



ABSTRACT

AEC development is a salient issue for the states on Southeast Asian region, because the formation of one market and production base its deliver. The main problem encountered by the member states in order to achieve it is the economic development gap of each country that differ greatly. ASEAN as a regional institution has classified its member states into two categories, there are the states with sufficient economic development for following the regional measures, called ASEAN-6 (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, and Philippines) and the states with incapability to cope with MEA standard on economic development basis, called CLMV (Cambodia, Vietnam, Myanmar, and Vietnam). Particularly, these CLMV states personal measures to chase their drawbacks have been accommodated by various programs, such as IAI and NDG. Unfortunately these ASEAN's initiatives cannot fully overcome the development gaps, mainly among the developing states that included as ASEN-6, which are located on East ASEAN sub-region. The role of BIMP-EAGA as a sub-regional institution on this occasion is very important, as a subsidiary of AEC to increase connectivity in member states economic development. BIMP-EAGA itself can take a role for its member states to overcome the AEC as an impetus, through modification on its strategic pillars. By changing the fundamental and strategist values from 'Roadmap to Development' to 'Implementation Blueprint', even though it's still carries the former fundamental values of BIMP, its devoted to be more oriented to its programs implementation process. This form of BIMP's issue reconciliation could be considered substantively taking part on the development of AEC, judging from its correlation and interdependencies toward AEC's framework holistically.

Keywords: AEC, BIMP-EAGA, Roadmap to Development, Implementation Blueprint, Intitutional reconciliation, Institution modification



INTISARI

Pembentukan MEA merupakan sebuah isu penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena esensi dalam penyatuan pasar dan basis produksi yang dibawanya. Masalah utama yang dihadapi negara-negara anggota dalam mencapainya adalah kesenjangan pembangunan tiap negara yang berbeda-beda. ASEAN sendiri telah mengklasifikasikan Negara anggotanya menjadi dua kategori, yaitu Negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang dianggap dapat mengikuti kebijakan regional atau ASEAN-6, dan Negara anggota dengan pembangunan ekonomi yang belum mampu mengikuti standar MEA (CLMV). Secara khusus, Negara-negara CLMV diakomodasi langkah-langkahnya dalam mengejar ketertinggalan pembangunan melalui berbagai program, seperti IAI dan NDG. Namun inisiasi dari ASEAN ini tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesenjangan pembangunan, utamanya adalah Negara- Negara berkembang yang masuk dalam kategori ASEAN-6, yang berada di sub-kawasan ASEAN timur. Dalam hal inilah peran dari institusi sub-kawasan BIMP-EAGA menjadi penting, sebagai perpanjangan tangan dari MEA untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Negara anggota. BIMP-EAGA sendiri dapat berperan bagi negara anggotanya dalam menghadapi MEA sebagai sebuah impetus melalui modifikasi yang dilakukan terhadap pilar-pilar strategisnya. Dengan merubah nilai fundamental dan strategis dalam *Roadmap to Development* menjadi *Implementation Blueprint* yang walaupun masih membawa nilai fundamental BIMP, namun lebih berorientasi terhadap implementasi program-programnya. Bentuk rekonsiliasi isu dalam BIMP ini dapat dikatakan berperan secara substantif dalam pembentukan MEA melihat dari korelasi dan interdependensinya terhadap *framework* MEA secara holistik.

Kata kunci: MEA, BIMP-EAGA, *Roadmap to Development*, *Implementation Blueprint*, rekonsiliasi institusi, modifikasi institusi.

Jumlah Kata: 10.989 kata